

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Rozali, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aminah, Siti, 2014, *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*, KENCANA Prenadamedia Group, Jakarta.

Amrusyi, Fahmi, 1987, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Media Sarana Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

-----, *Perihal Undang-Undang*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fanani, Muhyar, 2009, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta.

Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hamidi, Jazim dkk., 2012, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, UB Press, Malang.

Harahap, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

-----, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

- , 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- Husain, Najib, 2008, *Gejolak Politik dalam Penataan Daerah Kab. Buton Utara Pasca Pemekaran*, Dalam *Dinamika Politik Lokal Di Indonesia: Penataan Daerah dan Dinamikanya*, Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), Salatiga.
- Jeddawi, Murtir, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta.
- , 2005, *Memicu Investasi di Era Otonomi Daerah: Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal*, UII Press, Yogyakarta.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung.
- Kansil C.S.T dan Cristine S.T Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurde, Nukthoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Latief, Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.
- Marzuki, Laica, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Mulyosudarmo, Soewoto, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, In-Trans, Malang.
- Muslimin, Amrah, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Nalle, Victor Imanuel W., 2013, *Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Ujian Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Setara Press, Malang.

- Nasution, Bahder Johan, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan, H.R., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sabarno, Hari, 2008, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samudra, Syahda Guruh Langkah, 2000, *Menimbang Otonomi Vs Federal*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Santoso, H.M. Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, dan Syarifidin Hidayat, 2011, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju Bandung.
- Setiawan, Dian Bakti, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung.
- , 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sukriono, Didik, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaukani, dkk., 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.

Wardani, Kunti Diah, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Zaini, Helmy Faishal, 2007, *Bentuk Final NKRI: Perang Ideologi dan Gerakan Politik Tentang Bentuk Negara*, RMBOOKS, Jakarta.

B. Tesis, Skripsi dan Hasil Penelitian

Amabarita, Bonar Zeitsel, 2010, “Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Simalungun Terhadap Pengembangan Wilayah Kecamatan Raya”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.

Indrahayu,Dirwan, 2012, “Konflik Ibukota di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Skripsi*, FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316), *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor), *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibukota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibukota, dan Pemindahan Ibukota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 365).

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032, (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012).

D. Sumber Online dan Lain-lain

[Http://Otda.Kemendagri.Go.Id/Index.Php/2014-10-27-09-17-43](http://Otda.Kemendagri.Go.Id/Index.Php/2014-10-27-09-17-43), diakses pada tanggal 1 Juli 2016.

[Http://www.Butonutarakab.go.id/statis-5-sejarahbutonutara.html](http://www.Butonutarakab.go.id/statis-5-sejarahbutonutara.html), diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

[Http://Www.Kppod.Org/Datapdf/Daerah/Daftar-Dob-1999-2014.Pdf](http://Www.Kppod.Org/Datapdf/Daerah/Daftar-Dob-1999-2014.Pdf), diakses pada tanggal 1 April 2016.

Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.